

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pariwisata di Indonesia memiliki peluang yang besar sejalan dengan besarnya potensi pariwisata yang dimiliki. Potensi ini harus sejalan dengan pengelolaan yang dapat mengembangkan pariwisata tersebut. Salah satu aspek dari definisi pariwisata adalah interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan mencakup berbagai aspek dan disiplin. Itu muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (UU Nomor 10 Tahun 2009)

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan pengertian kepariwisataan dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kepariwisataan mencakup interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, selain dengan sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Masyarakat setempat memiliki peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata. Bahkan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, serta asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Selain itu,

Pasal 5 juga menegaskan bahwa salah satu prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 5 menyatakan bahwa masyarakat setempat yang dimaksud adalah mereka yang tinggal di wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata di wilayah tersebut. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa pemberdayaan dan keterlibatan aktif masyarakat setempat sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dibuat untuk menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs), yang berlaku sejak 2015–2030 dan disetujui oleh kurang lebih 190 negara di seluruh dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan, dan tujuannya adalah untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan banyak negara di seluruh dunia. Dalam industri pariwisata, masyarakat lokal menjadi pemangku kepentingan utama, seperti yang ditunjukkan oleh agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini ditunjukkan oleh penciptaan dan penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas (CBT) oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 2016 dan organisasi global seperti *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tahun yang sama, yang mengutamakan pariwisata yang berkelanjutan (Guo et al., 2019 ; Agustang et al., 2021). Kedua organisasi global tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. agar komunitas lokal tidak hanya "penonton" di tanah leluhurnya.

Namun, masalahnya adalah bahwa pertumbuhan pariwisata seringkali mengabaikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia :

1. Degradasi lingkungan - Pertumbuhan industri pariwisata yang cepat seringkali menyebabkan peningkatan polusi, deforestasi, dan penurunan sumber daya alam.
2. Infrastruktur yang tidak memadai - Banyak wilayah di Indonesia kurang memiliki infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, sanitasi, dan fasilitas pengelolaan sampah, yang dapat menghambat pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
3. Komodifikasi budaya - Komersialisasi artefak budaya dan tradisi untuk tujuan pariwisata dapat menyebabkan kehilangan otentisitas dan identitas budaya.
4. Partisipasi masyarakat yang terbatas - Masyarakat di destinasi pariwisata mungkin tidak memiliki pengaruh dalam bagaimana pariwisata dikembangkan dan dikelola, menyebabkan kurangnya manfaat bagi mereka dan potensi konflik.
5. Pengembangan yang tidak teratur - Kurangnya regulasi dan pedoman untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat menyebabkan pertumbuhan pariwisata yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan.
6. Kurangnya kesadaran - Kurangnya kesadaran di kalangan pemangku kepentingan, termasuk wisatawan, masyarakat lokal, dan bisnis, tentang

pentingnya pariwisata berkelanjutan dapat menghambat pengembangannya.

7. Dampak perubahan iklim - Pengaruh perubahan iklim pada sumber daya alam dan lingkungan Indonesia dapat memengaruhi pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Pemerintah saat ini berusaha mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf RI) berkonsentrasi pada peningkatan pariwisata berkelanjutan atau berkelanjutan di Indonesia daripada mengejar jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Akibatnya, penting untuk mempelajari seberapa besar peran pariwisata berbasis masyarakat, atau pariwisata berkelanjutan, dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, memberikan desa kewenangan yang sangat besar untuk mengelola aset dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Undang-undang ini juga memungkinkan desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain dengan adanya UU Desa, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan kepada desa melalui dana desa yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya.(Purnomo et al., 2020)

Tabel 1. 1 Desa Wisata Di Semarang

No	Kecamatan	Desa	Potensi Desa Wisata
1.	Gunung Pati	Cepoko	Kebun buah
2.	Gunung Pati	Jatirejo	Kuliner kolang-kaling
3.	Gunung Pati	Kandri	Wisata perahu
4.	Gunung Pati	Nongkosawit	Omah pang
5.	Mijen	Kedungpane	Curug Gondoriyo
6.	Mijen	Wonolopo	Agrowista
7.	Tugurejo	Tugurejo	Mangrove

*Sumber : SIKENANG*

Pemerintah Kota Semarang dan pemerintah daerah lainnya di Jawa Tengah sedang berusaha untuk mengembangkan pariwisata melalui pembangunan desa wisata. Desa Wisata Wonolopo adalah salah satu contohnya yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki kekayaan budaya dan alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Namun, selama ini perkembangan pariwisata di Desa Wonolopo belum optimal dan masih mengalami banyak kendala, seperti minimnya infrastruktur pariwisata, kurangnya pemasaran, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Yuniningsih (2019) dan Pradana (2016) masyarakat desa Wonolopo sangat antusias dengan adanya desa wisata. Namun, minimnya kerja sama antara masyarakat dan pengelola wisata. Masyarakat merasa bahwa pengelola kurang transparan, sedangkan pengelola enggan untuk berpartisipasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan adanya peran pariwisata yang berbasis masyarakat atau *community based tourism*. *Community based tourism* merupakan

pendekatan pengembangan pariwisata yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pariwisata. Dalam *community based tourism*, masyarakat setempat menjadi tuan rumah atau *host* bagi wisatawan, dan berperan aktif dalam menyediakan pengalaman wisata yang berkesan dan autentik kepada wisatawan

Desa Wisata Wonolopo adalah salah satu tempat wisata di Kota Semarang. Desa Wisata Wonolopo berada di kelurahan Wonolopo di kecamatan Mijen, 18 km dari pusat kota. Kelurahan Wonolopo masih memiliki dataran hijau seluas 400,38 hektar yang memungkinkan pertanian. Pada tahun 2012, Kelurahan Wonolopo ditetapkan sebagai Desa Wisata bersama dengan Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Nongkosawit dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407. Diharapkan dengan ditetapkannya sebagai Desa Wisata, warga dapat memanfaatkan, mengembangkan, dan menjual potensi yang dimilikinya..

Para peneliti menetapkan Desa Wisata Wonolopo sebagai lokasi penelitian berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012, yang mencantumkan tiga desa wisata, hanya Desa Wisata Wonolopo yang perkembangannya kurang optimal dibandingkan Desa Wisata Kandri dan Nongkosawit. Berdasarkan informasi dari situs web Jadesta, Desa Wisata Kandri sudah maju, sedangkan Wonolopo masih dalam tahap perkembangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pradana (2016) , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Semarang telah beberapa kali melakukan kegiatan pembinaan, termasuk pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata dan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata untuk pengembangan desa wisata. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang harus membagi tanggung jawab untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Semarang. Akibatnya, kegiatan ini tidak dapat berjalan optimal di Desa Wisata di Kota Semarang, khususnya di Desa Wisata Wonolopo (Pradana, 2016).

Kawasan Desa Wisata Wonolopo dibagi menjadi 10 RW, masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berpotensi untuk dikembangkan. Setiap RW memiliki potensi unik seperti budidaya bebek, embung Wonolopo, dan kampung jamu, yang semuanya menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Di antara semua itu, kampung jamu menjadi daya tarik utama karena nilai historisnya yang khas. Keberadaan kampung jamu ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga melestarikan tradisi pengobatan herbal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengembangan lebih lanjut dari masing-masing RW dapat meningkatkan daya tarik keseluruhan Desa Wisata Wonolopo, menjadikannya destinasi yang lebih beragam dan menarik.

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki kualitas hidup mereka. Salah

satu aspek keberhasilan program pembangunan adalah partisipasi masyarakat, yang diukur melalui partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan keuntungan yang diterima masyarakat dari program tersebut. Pengembangan Desa Wisata Wonolopo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonolopo serta meningkatkan taraf hidup mereka dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Melalui peran pariwisata berbasis masyarakat, Desa Wonolopo dapat mengembangkan potensi wisata alam dan budaya yang dimilikinya secara berkelanjutan. Masyarakat setempat dapat berperan sebagai pemandu wisata, penyedia akomodasi, pengrajin souvenir, dan penyedia makanan dan minuman khas daerah. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka secara langsung melalui pengembangan pariwisata.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga dapat memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan kelestarian budaya. Masyarakat setempat dapat mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal sambil menjaga alam dan lingkungan sekitar lestari untuk dinikmati generasi mendatang. Dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, Desa Wonolopo juga perlu memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti pengelolaan limbah dan energi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dengan adanya peran pariwisata berbasis masyarakat dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, diharapkan Desa

Wonolopo dapat menjadi destinasi pariwisata yang unik dan berkesan serta memberikan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci dalam mengembangkan desa wisata karena kekayaan sumber daya alam dan keunikannya yang tercermin dalam tradisi dan budaya, menjadi pendorong utama bagi perkembangan destinasi wisata tersebut. Survei pra-lapangan ini akan mengidentifikasi masalah yang terdapat di Desa Wisata Wonolopo. Peneliti akan mengevaluasi permasalahan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal dengan menggunakan konsep tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap pemberdayaan. Selain itu, survei lapangan akan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo. Berdasarkan informasi tersebut dan mengingat pentingnya penelitian ini untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang, peneliti tertarik melakukan studi di Desa Wisata Wonolopo dengan judul penelitian **Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat masih kurang padahal Desa Wisata Wonolopo termasuk desa wisata yang berkembang dan

terkenal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Yuniningsih, 2019) Penelitian mengenai partisipasi masyarakat Desa Wonolopo menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan masyarakat yang umumnya hanya lulusan sekolah dasar, menyebabkan kesulitan dalam berpartisipasi dalam program Desa Wisata. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kurangnya penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur dapat menghambat kesadaran masyarakat. Masyarakat yang menjadi kurang memahami manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi aktif dalam desa wisata, sehingga kurang termotivasi untuk terlibat. Kurangnya pemahaman tentang peran mereka dalam pengembangan desa wisata.

2. Meskipun infrastruktur masih mengacu pada sistem musrenbang, tidak terdapat keistimewaan yang tampak dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang” oleh (Putri & Yuniningsih, 2019) masih kurangnya inovasi dari warga terkait dengan pengembangan infrastruktur. Hal ini bisa menyebabkan terbatasnya fasilitas pendukung seperti akses transportasi, sanitasi, dan energi yang dapat menghambat perkembangan dan daya tarik desa wisata.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang ?
2. Apa faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo, Kota Semarang.
2. Untuk menelaah faktor yang menghambat tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo, Kota Semarang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis, serta kemampuan menulis karya ilmiah, dengan berpedoman pada teori yang dipelajari di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Harapannya, hasil penelitian ini dapat berperan sebagai instrumen dalam mengembangkan kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat, sambil menjadi kontribusi literatur yang memperluas ruang diskusi, mengenrich pengetahuan dalam ranah akademis, dan memberikan titik tolak bagi penelitian yang akan datang.

#### **1.4.3 Kegunaan Praktis**

Harapannya, temuan dari studi ini diinginkan mampu memberikan kontribusi bagi pengetahuan pembaca serta menstimulasi pemikiran masyarakat di wilayah Desa Wonolopo mengenai strategi pengembangan Desa Wisata agar dapat meningkatkan kualitas dan perkembangan di masa mendatang. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat secara umum dalam mengoptimalkan sumber daya alam lokal dan merencanakan pemanfaatannya secara efektif melalui program pemberdayaan komunitas.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan ringkasan dari artikel penelitian sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi judul penelitian, peneliti, sumber jurnal, tujuan penelitian, temuan penelitian, dan perbedaan penelitian yang sudah diteliti dengan yang akan diteliti. Berikut Tabel 1.2 dengan hasil tabel ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
1.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji	Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati. Universitas Padjadjaran(2020)	Tujuannya adalah untuk memahami cara masyarakat diberdayakan dalam konteks program desa wisata.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori pemberdayaan menurut Kartasasmita	Desa Wisata Bumiaji memanfaatkan potensi lokal untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Perubahan yang dihasilkannya terutama adalah peningkatan pengetahuan dan ekonomi masyarakat.
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangduwur dalam Pengembangan Potensi Wisata Pantai Menganti Kabupaten Kebumen	Wandira, P., & Lestari, P. (2021).	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pariwisata Pantai Menganti Kebumen serta untuk memahami kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan tersebut.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teori sumodiningrat	Penelitian ini menegaskan bahwa (1) upaya pemberdayaan masyarakat dimulai sejak tahap awal perencanaan pembangunan dan dijalankan melalui tujuh langkah: persiapan, evaluasi, penyusunan alternatif program atau kegiatan, pelaksanaan rencana aksi, implementasi program atau kegiatan, evaluasi, dan terminasi. (2) Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangduwur dan LMDH, yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata Pantai Menganti. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi landasan bagi kerja sama ini. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
					implementasi kebijakan, yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi organisasi dan peningkatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
3	<i>Empowerment Community in Buru Regency</i>	Umanailo, M.C.B.,et.al (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas Komunitas Pemberdayaa n yang diadakan di Kabupaten Buru sejak tahun 2005 hingga 2014.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis menggunakan teori konsep Miles, Huberman dan Spradley	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemberdayaan di Kabupaten Buru belum mencapai nilai substansial antara tahun 2005 dan 2014. Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman masyarakat tentang program yang rendah. Banyak program bergantung pada sistem penganggaran dan pusat dan regional. Perlu ada perubahan dalam cara program pemberdayaan dijalankan. Perlu diintegrasikan ke dalam tingkat struktur dan operasional. Agar program tidak tersumbat di daerah tersebut, alur kerjanya harus jelas.
4	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar	I Wayan Pantiyasa (2021)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi berbagai strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bedulu, termasuk	Penelitian ini menggunakan metode campuran antara penelitian kualitatif dan kuantitatif	Menurut HM Yakub (1985), "pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (empowering sosial) yang meliputi tiga hal yaitu (1) membebaskan dan menyadarkan,(b) mengidentifikasi masalah dan memecahkannya,(2) partisipasi dan etos swadaya masyarakat". Dengan demikian, dapat

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
			<p>organisasi pengelolaan, profil wisatawan yang berkunjung, persepsi wisatawan yang menginap terhadap layanan, persepsi travel agent terhadap pengelolaan Desa Bedulu, dan partisipasi dan dukungan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.</p>		<p>disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat adalah upaya membantu masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri.</p>
5	<p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Urongo Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>Suraji, Ruli Sumual, Piet Pusung, et al (2021)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata</p>	<p>penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Ambar Teguh Sulistiyani</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang cukup baik adalah kemitraan dan bantuan,</p>

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
			Urongo serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut		tetapi upaya yang kurang baik adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata, dan kurangnya bantuan PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam pengembangan Desa Wisata Urongo, ada aspek yang cukup baik, yaitu kemitraan, promosi, pembinaan lembaga sosial, dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Namun, pengembangan Desa Wisata Urongo belum optimal.
6	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang	Nadia Isnaini Putri, Tri Yuningsih dalam journal undip (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata wonolopo	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teori Midgley	<p>Dalam mengevaluasi partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, tiga kriteria pokok akan digunakan untuk menilai keaslian partisipasi tersebut, yang dikenal sebagai partisipasi yang autentik, atau dalam istilah lain, partisipasi yang nyata. Jika salah satu dari tiga indikator tersebut tidak terpenuhi, maka partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo akan dianggap sebagai partisipasi semu atau pseudo-partisipasi. Ketiga kriteria tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi atau bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam pengembangan Desa</li> </ol>

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
					<p>Wisata Wonolopo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Distribusi manfaat yang merata kepada seluruh anggota masyarakat.</li> <li>3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Wonolopo.</li> </ol>
7	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	Hidayatullah & Suminar, (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan, dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sumodinigrat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan menggunakan lima tahap yaitu pengembangan kelembagaan kelompok. Pemupukan modal masyarakat. Pengembangan usaha produktif. Penyediaan informasi tepat guna. Pelaksanaan pemberdayaan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi, tahap pengayaan. Faktor pendukung pemberdayaan yaitu partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yaitu masyarakat yang belum sadar wisata. Keberhasilan bidang ekonomi, sosial dan budaya
8	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Batik Jetis	Rosyida, I. N., & Ismail, H. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa,	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sumodinigrat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pemberdayaan dalam Pengembangan Kampung Batik Jetis dilaksanakan cukup baik. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu 1) Keterampilan, meliputi pendidikan dan pelatihan; 2) Akses pasar, meliputi

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
			khususnya dalam pengembangan di Kampoeng Batik Jetis.		aksesibilitas mendapatkan bahan baku dan bahan pendukung lainnya dalam meningkatkan proses produksi, melibatkan pameran UMKM untuk memperluas akses pasar, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), 3) Akses modal, meliputi fasilitas permodalan.
9	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wisata Edukasi Dan Dampak Yang Didapatkan Masyarakat Desa Pujonkidul	(Hermawan et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi dan dampak yang didapatkan masyarakat desa Pujonkidul	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sumodinigrat	Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi terdapat dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat lokal. Terlebih dalam hal ekonomi.
10	<i>Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation</i>	Yanes, Andrea, et al (2019)	Penelitian ini bertujuan membahas mengenai evaluasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat di negara negara berkembang	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori CBT oleh Spencely	Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan sering menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, namun ketergantungan pada otoritas lokal untuk mengatur hubungan kekuasaan menunjukkan netralitas mereka. Meskipun sektor swasta dan badan pusat cenderung menentang partisipasi masyarakat, lembaga daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi inisiatif masyarakat biasanya mendukung partisipasi, meskipun dengan batasan tertentu.

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
					Meskipun demikian, tekanan dari organisasi lokal dan LSM internasional telah meningkatkan penerapan kebijakan partisipatif dan pembentukan mekanisme yang mendukung inisiatif komunitas. Meskipun masih ada tantangan, terdapat perbaikan bertahap dalam pengembangan dan pemberdayaan <i>Community-Based Tourism</i> (CBT). Sekarang, pemerintah juga aktif memimpin program lokal dan mendorong pariwisata lokal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat.
11	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata	Encang Saepudin , Agung Budino , Mas Halimah (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Friedman (1993) dalam Priyono dan Pranarka (1996)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan mengalami peningkatan khususnya mengenai pelayanan prima dan promosi pariwisata. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi kegiatan khususnya hasil pre-test dan post-test. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengelola desa wisata di Cibodas.
12	<i>Empowerment model for</i>	Purnomo, S., Rahayu, E. S.,	Penelitian ini bertujuan	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
	<i>sustainable tourism village in an emerging country</i>	Riani, A. L., Suminah, S., & Udin, U (2020)	untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan di Indonesia.	n metode deskriptif kualitatif	pengembangan pariwisata di Desa Ponggok menggunakan empat pendekatan utama: pendekatan spasial, sektoral, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Keberhasilan pendekatan tersebut dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, inovasi, kolaborasi, dan tata kelola desa yang baik. Desa Ponggok berhasil menjadi desa mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa mampu memberdayakan masyarakat untuk mengelola pembangunan pariwisata berkelanjutan.
13	<i>Community Empowerment Strategy Towards a Sustainable Rural Community-based Tourism Village</i>	Agustang A., Adam A., Upe A. (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Desa Bira menjadi Sustainable Rural Community Based Tourism berdasarkan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan di Desa Bira untuk mendukung pencapaian status sebagai Sustainable Rural Community Based Tourism (SRCBT). Ini melibatkan integrasi konsep desa wisata, pariwisata berbasis komunitas, dan pariwisata berkelanjutan dalam satu kerangka SRCBT. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kemauan masyarakat lokal dalam mengembangkan Pariwisata Berbasis Komunitas Perdesaan Berkelanjutan di daerah mereka.
14	<i>Community</i>	Putri, A. E.,	Tujuan dari	Penelitian ini	Penelitian ini menemukan

No.	Judul	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Temuan
	<i>Empowerment In The Development Of Mangrove Tourism In Batu Karas Of Pangandaran, West Java</i>	Khadijah, U. L. S., & Novianti, E. (2020)	penelitian ini adalah untuk mengetahui model yang dilakukan masyarakat setempat dalam upaya pengembangan wisata mangrove di Desa Batu Karas	menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori pemberdayaan masyarakat	bahwa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di bidang pariwisata dikatakan cukup memberikan dampak terhadap tingkat perekonomian masyarakat desa wisata, apalagi dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait yang lebih memperhatikan mangrove.
15	<i>The community empowerment program based on local potential through tourism village</i>	Kurniawan, M. U., & Cahyono, A. E. (2020)	Hal ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan potensi masyarakat setempat melalui program desa wisata	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengembangan dari model sebelumnya yang hanya fokus pada diversifikasi produk unggulan. Penelitian ini menggabungkan model pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan dengan tiga dimensi (ekonomi, sosial budaya, dan ekologi), menciptakan model pemberdayaan yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk pengembangan Desa Wisata dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal oleh masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak pengembangan desa wisata terhadap masyarakat melalui dimensi ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

Penelitian Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, dan Eni Prasetyawati (2020) berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji” bertujuan mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat pada program desa wisata desa Bumaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori pemberdayaan menurut Kartasasmita. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memaksimalkan program desa wisata berbasis potensi lokal. Komunitas pariwisata Bumiaji menimbulkan transformasi, terutama dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.

Wandira & Lestari, (2021) meneliti tentang "Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangduwur dalam Pengembangan Potensi Wisata Pantai Menganti Kabupaten Kebumen". Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Karangduwur dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi wisata Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hasil riset ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa Karangduwur dan LMDH sebagai manajer Pantai Menganti. Bentuk kemitraan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 yang mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi terhadap kebijakan ini dilakukan berdasarkan lima variabel, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan kegiatan, karakteristik pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Umanailo et al., (2019) dengan penelitian berjudul “*Empowerment Community in Buru Regency*” tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi efektivitas Komunitas Pemberdayaan yang diadakan di Kabupaten Buru sejak tahun 2005 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis menggunakan teori konsep Miles, Huberman dan Spradley. Analisis data menunjukkan bahwa selama rentang waktu 2005-2014, upaya pemberdayaan di Kabupaten Buru belum berhasil mencapai tingkat substansi yang diharapkan. Ini tercermin dari kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan program-program tersebut. Terdapat banyak tumpang tindih antara inisiatif pusat dan daerah, serta ketergantungan pada alokasi anggaran yang berujung pada berbagai program. Diperlukan perubahan dalam pendekatan pelaksanaan pemberdayaan, yang mencakup integrasi program-program pemberdayaan masyarakat secara struktural dan operasional. Perlunya penataan yang lebih terstruktur untuk menghindari penumpukan program di wilayah tersebut.

I Wayan Pantiyasa (2021) dengan penelitiannya berjudul “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar)”. Hasil dari penelitian ini tata kelola Pengembangan Pariwisata

berbasis Masyarakat (Community Based Tourism masih sederhana yaitu dengan sistem manual, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional bidang pemasaran, reseptionis, reservation, tour guide, akan tetapi accountable, transparan.

Suraji et al., (2021) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Urongo Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Upaya pemberdayaan masyarakat yang cukup optimal yaitu kemitraan dan bantuan pendampingan. Upaya yang belum optimal yaitu belum menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata, terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dan belum adanya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata.

Nadia Isnaini Putri, Tri Yuningsih dalam journal undip (2019) dengan judul penelitian “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang” menggunakan metode deskriptif dengan teori Midgley bertujuan untuk memberikan analisa mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata wonolopo. Tiga aspek yang harus dipenuhi adalah: kontribusi atau kontribusi masyarakat terhadap

peningkatan Desa Wisata Wonolopo, distribusi manfaat yang adil, dan proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Wonolopo.

(Hidayatullah & Suminar, 2021) dengan judul penelitian “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten” dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan, dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sumodinigrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan menggunakan lima tahap yaitu pengembangan SDM. Pengembangan kelembagaan kelompok. Pemupukan modal masyarakat. Pengembangan usaha produktif. Penyediaan informasi tepat guna. Pelaksanaan pemberdayaan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi, tahap pengayaan.

Rosyida, I. N., & Ismail, H. (2023) dalam penelitian berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kampong Batik Jetis” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sumodinigrat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pemberdayaan dalam Pengembangan Kampong Batik Jetis dilaksanakan cukup baik. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu 1) Keterampilan, meliputi pendidikan dan pelatihan; 2) Akses pasar, meliputi aksesibilitas mendapatkan bahan baku dan

bahan pendukung lainnya dalam meningkatkan proses produksi, melibatkan pameran UMKM untuk memperluas akses pasar, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), 3) Akses modal, meliputi fasilitas permodalan.

Hermawan, Y., Hidayatullah, S., Alviana, S., Hermin, D., & Rachmadian, A. (2021) dengan penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wisata Edukasi Dan Dampak Yang Didapatkan Masyarakat Desa Pujonkidul” bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi dan dampak yang didapatkan masyarakat desa Pujonkidul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sumodinigrat. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi terdapat dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat lokal. Terlebih dalam hal ekonomi.

Yanes, Andrea, et al (2019) dengan penelitiannya berjudul “*Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation*” bertujuan membahas mengenai evaluasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat di negara negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori CBT oleh Spencely. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut lemah dalam memberikan dasar untuk keterlibatan masyarakat dalam CBT. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa hambatan-hambatan terhadap CBT serupa di seluruh dunia; oleh karena itu, kerangka kerja ini bermanfaat dalam evaluasi dokumen kebijakan di negara-negara berkembang lainnya.

Encang Saepudin , Agung Budino , Mas Halimah (2022) dalam penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata” Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan mengalami peningkatan khususnya mengenai pelayanan prima dan promosi pariwisata. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi kegiatan khususnya hasil pre-test dan post-test. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengelola desa wisata di Cibodas.

Purnomo, S., Rahayu, E. S., Riani, A. L., Suminah, S., & Udin, U (2020) dalam penelitiannya “*Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country*” bertujuan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata yang dilakukan di Desa Ponggok menggunakan empat pendekatan (1) pendekatan spasial sebagai landasan dalam menentukan arah pengembangan desa; (2) pendekatan sektoral melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa untuk membangun perekonomian desa; (3) sumber daya manusia untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola potensi desa; dan (4) pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi dan akuntabilitas.

Agustang A., Adam A., Upe A. (2021) dalam penelitiannya berjudul “*Community Empowerment Strategy Towards a Sustainable Rural Community-based Tourism Village*” bertujuan untuk menganalisis potensi Desa Bira menjadi *Sustainable Rural Community Based Tourism* berdasarkan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat. menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan di desa ini untuk mendukung terwujudnya Desa Bira sebagai *Sustainable Rural Community Based Tourism* (SRCBT). Konsep ini merupakan integrasi konsep desa wisata, pariwisata berbasis komunitas, dan pariwisata berkelanjutan dalam satu batasan *Sustainable Rural Community Based Tourism*.

Putri, A. E., Khadijah, U. L. S., & Novianti, E. (2020) dengan penelitian berjudul “*Community Empowerment In The Development Of Mangrove Tourism In Batu Karas Of Pangandaran, West Java*” bertujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model yang dilakukan masyarakat setempat dalam upaya pengembangan wisata mangrove di Desa Batu Karas. Penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di bidang pariwisata dikatakan cukup memberikan dampak terhadap tingkat perekonomian masyarakat desa wisata, apalagi dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait yang lebih memperhatikan mangrove.

Kurniawan, M. U., & Cahyono, A. E. (2020) dalam penelitian berjudul “*The community empowerment program based on local potential through tourism village*” bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan potensi masyarakat setempat melalui program desa wisata. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Model Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengembangan dari model sebelumnya yang hanya fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan melakukan diversifikasi produk unggulan. Penelitian ini memadukan model pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan dengan tiga dimensi (dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi ekologi) sehingga hasil penelitian ini dapat menciptakan model pemberdayaan yang komprehensif.

## **1.5.2 Kajian Teori**

### **1.5.2.1 Administrasi Publik**

Pengertian Administrasi Publik menurut ilmuwan ahli Felix A. Nigro dan L. Loyd G Nigro (Keban, 2008:5-6) menyatakan bahwa “administrasi publik adalah suatu usaha kerjasama dalam lingkungan publik dan meliputi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik dan sangat berbeda dengan administrasi swasta yang erat kaitannya dengan kelompok swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Siansari, 2016). Sementara ahli lainnya yaitu menurut Nicholas Hendry (Herbani Pasolong, 2011: 8) berpendapat bahwa “administrasi publik adalah kombinasi lengkap dari teori dan praktik yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat dan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat”. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu teori dan proses

dalam manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi perintah dalam pelaksanaannya baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi melayani masyarakat secara keseluruhan. 7 hal yang menjadi ciri administrasi publik menurut Caiden 1982, yaitu:

- Kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindar
- Administrasi publik mengharapkan kepatuhan
- Administrasi publik memiliki prioritas
- Administrasi publik memiliki pengecualian
- Manajemen puncak administrasi publik adalah politik
- Kinerja administrasi publik sulit diukur
- Administrasi publik memiliki banyak harapan

#### **1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam Thoha (2014:18) mengemukakan paradigma administrasi Negara/publik sebagai berikut :

##### **1. Dikotomi Administrasi Politik (1900-1926)**

Hal yang mendasari munculnya paradigma ini adalah memisahkan fungsi politik dan pemerintahan, hal ini dilakukan dengan suatu tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam paradigma ini, Woodrow Wilson juga mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi agar Administrasi Publik dianggap efektif, yakni (1) Pembatasan politik dari aspek administratif; (2) Perbandingan struktur organisasi

antara sektor publik dan swasta; (3) Peningkatan efisiensi melalui adopsi praktik dan sikap yang mirip dengan bisnis dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari; dan (4) Peningkatan efektivitas layanan publik melalui pengelolaan serta pelatihan pegawai negeri sipil, serta penilaian kinerja yang memotivasi.

## 2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Hal yang mendasari munculnya paradigma ini adalah diskusi mengenai prinsip-prinsip administrasi. Dalam paradigma ini dikenal “Tujuh Prinsip”. Administrasi (Perencanaan, Pengorganisasian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, Penganggaran) merupakan esensi dari paradigma ini yang menekankan pada prinsip-prinsip administrasi yang dapat diterapkan secara universal dalam konteks berbagai jenis organisasi maupun lingkungan sosial budaya.

## 3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Hal yang mendasari munculnya paradigma ini adalah pandangan Henry ada kemauan yang besar dan kuat dari para ilmuwan politik untuk mencapai hal ini mengklaim kembali administrasi publik yang merupakan bagian dari ilmu politik dan Pada saat yang sama juga terdapat peningkatan upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan manajemen, yaitu mengklaim administrasi publik menjadi bagiannya dari ilmu manajemen. Paradigma ini melakukan upaya untuk dapat membangun kembali

ke hubungan konseptual antar administrasi pada saat itu, oleh Itu sebabnya administrasi kembali ke induk ilmunya, yaitu ilmu politik, karena itu adalah hasil perubahan dan pembaharuan.

#### 4. Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Hal yang mendasari munculnya paradigma ini adalah paradigma ini adalah salah satu periode kemenangan bagi para ilmuwan manajemen menjadikan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat ini, ilmu politik dan ilmu manajemen saling bersaing untuk dapat menempatkan diri sebagai pihak yang paling berhak memberikan pengakuan terhadap ilmu Administrasi Publik.

#### 5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini merupakan tahapan New Public Management (NPM). Hal yang landasan munculnya paradigma ini adalah administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi ilmiah yang otonom. Paradigma ini berfokus untuk identifikasi dengan hierarki, birokrasi bergeser ke pasar, dan organisasi sektor swasta. New Public Management (NPM) dikatakan sebagai paradigma baru karena paradigma ini menekankan pada berbagai macam nilai yang belum ada pada paradigma sebelumnya. Nilai-nilai baru diperkenalkan dan ditekankan dalam paradigma ini yaitu nilai produktivitas, efisiensi dan nilai bisnis di sektor publik dengan tujuan memperbaiki keadaan birokrasi pemerintahan yang terlalu

boros, tidak efisien, terlalu besar, kinerjanya buruk pelayanan publik dll.

#### 6. *Governance* (1990-sekarang)

Hal yang mendasari munculnya paradigma ini adalah memberikan gambaran tentang proses mendasar pemerintahan modern yang dimiliki perbedaan dengan pemerintahan tradisional. Proses politik dipandang lebih penting luas karena masyarakat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik yang penting. Tata kelola juga memerlukan sektor lain untuk dapat memberikan layanan, jadi pemerintah hanya mengatur dan memberikan arahan saja. Oleh tata kelola secara keseluruhan memberikan layanan kepada jaringan organisasi - organisasi nirlaba, perusahaan swasta, dan tingkat pemerintahan lainnya. Pada dasarnya “governance” hanya melibatkan proses kemitraan dalam menjalankannya suatu fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan warga lokal, organisasi nirlaba, perusahaan swasta dan di tingkat pemerintah lainnya.

Berdasarkan penjabaran dari paradigma yang diungkapkan oleh Nicholas Henry penelitian ini masuk pada paradigma new public management. Hal tersebut dikarenakan pada paradigma new public management berkaitan dengan pemberdayaan dan manajemen. Sehubungan dengan hal itu, riset berikut membahas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Wonolopo untuk

mewujudkan masyarakat yang mandiri melalui tahapan proses pemberdayaan

### **1.5.2.3 Manajemen Publik**

Pengertian manajemen publik menurut pendapat para ahli (Ramto, 1997: 14) dan (Waluyo, 2007: 119) adalah “faktor terpenting dalam ilmu administrasi publik dengan menggunakan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia dan sumber dana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlambat”. Sedangkan pendapat ahli lain menurut Overman (Keban, 2004: 85) manajemen publik adalah “suatu studi interdisipliner tentang aspek umum organisasi dan kombinasi fungsi manajemen (perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, pengendalian) dengan manusia, keuangan, fisik, informasi dan sumber daya politik”.

Ghofur berpendapat manajemen publik atau manajemen pemerintahan merupakan suatu proses pemberian pelayanan kepada publik melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan (Safitri, 2020:4). Overman (dalam Keban, 2014:92) berpendapat manajemen publik yaitu studi interdisipliner aspek umum organisasi dan kombinasi atas sejumlah fungsi manajemen misalnya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian melalui penggunaan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik. Berdasarkan Mc Kevitt & Lawton (dalam Sudarmanto, 2020:2) mendefinisikan manajemen publik ialah studi interdisipliner tentang aspek organisasi, yakni

integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian fungsi manajemen dengan pengelolaan SDM, keuangan, informasi fisik serta politik. Sementara Hughes (dalam Sudarmanto, 2020: 2) menegaskan bahwasanya manajemen publik bukan milik administrasi, namun mengikutsertakan organisasi dengan cara yang paling efektif untuk meraih tujuan dan tanggung jawab penuh untuk mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan sejumlah penuturan ahli di atas bisa disimpulkan bahwasanya manajemen publik ialah sekumpulan mekanisme mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, hingga pengontrolan dalam organisasi melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia guna meraih tujuan yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil yang maksimal.

#### **1.5.2.4 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan suatu kekuatan atau kekuatan suatu benda (Maryani & Nainggolan, 2019:1). Pemberdayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu item tertentu agar menjadi lebih maju, termasuk pengembangan kualitas sumber daya, baik alam maupun sosial. Pemberdayaan mendorong tumbuhnya suatu ide dan kreativitas dalam mengembangkan sesuatu.

Endah (2020: 137) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang mengarah pada pemberdayaan dan meningkatkan kondisi

kehidupan masyarakat. Proses mengubah masyarakat menjadi lebih baik dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa upaya. Senada dengan hal tersebut, Widjaja dalam Endah (2020: 137-138) menyatakan bahwa esensi dasar pemberdayaan adalah upaya membangkitkan berbagai kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, motivasi, kesadaran, dan inovasi diperlukan peningkatan dan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Proses pemberdayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan banyak hal. Pemberdayaan didefinisikan tidak hanya sebagai proses penguatan tujuh kekuatan lemah, tetapi juga sebagai proses pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sangat penting dalam pembuatan program pemberdayaan desa karena merupakan objek dan subjek (Kushadajani & Permana, 2020:71).

Dikatakan pula oleh Sumodiningrat dalam Kurniawati & Supriyono (2009: 10-11) bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enableling*), memperkuat potensi dan kekuatan masyarakat (*Empowering*), serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat (*Protecting*).

1. Menciptakan iklim potensi masyarakat berkembang (*Enabling*), Ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang, sehingga konsep pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan yang ada, dan masyarakat akan termotivasi untuk mengembangkan setiap potensi yang ada.
2. Menguatkan potensi serta daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*), Dalam situasi seperti ini, peningkatan diperlukan melalui prosedur yang tepat dan nyata yang berkaitan dengan menyediakan berbagai macam input dan membuka peluang yang ada. Ini terkait dengan gagasan pemberdayaan, di mana nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, bertanggung jawab, dan keterbukaan ditanamkan sebagai standar pemberdayaan.
3. Memberikan keamanan dan perlindungan pada masyarakat (*Protecting*), Pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, karena pemberdayaan dilakukan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pemberdayaan juga tidak dilakukan untuk menciptakan ketergantungan di masyarakat, tetapi pada dasarnya dilakukan untuk memungkinkan masyarakat menikmati segala sesuatu yang dihimpun..

Terdapat beberapa tahapan dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat, tahapan dengan tujuan pengembangan masyarakat ini

akan mengarah pada terciptanya proses pemberdayaan masyarakat yang tepat.

Muliawan dalam Hendrayantoro (2014: 52) mengatakan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat menjadi 3 (tiga) tahapan, diantaranya sosialisasi, tahap transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian.

1. Tahap sosialisasi, tahapan ini dilakukan dengan melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa Wisata mensosialisasikan konsep Desa Wisata kepada warga masyarakat untuk memperoleh dukungan. Dimana pengelola berusaha meyakinkan warga bahwa dengan dibentuknya suatu desa wisata akan memberikan berbagai dampak terkhusus pada ekonomi maupun sosial budaya bagi masyarakat.
2. Tahap transformasi kemampuan, Ada berbagai bentuk transformasi kemampuan yang pertama melalui bantuan yang telah diberikan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Bantuan ini diperuntukkan guna peningkatan sumber daya manusia, serta memfasilitasi segala macam bentuk peningkatan pariwisata. Kedua, melalui adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dimana program mengarahkan pada terciptanya masyarakat yang memiliki pengetahuan luas tentang destinasi

wisata dan membentuk masyarakat yang trampil dalam mengelola organisasi Desa Wisata.

3. Tahap Kemandirian, jika dilihat dari proses pemberdayaan masyarakat, tahap kemandirian ini berbicara mengenai keterlibatan aktif masyarakat. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberikan wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lainnya. Kemudian pada tahapan kemandirian Sulistiyaning dalam Hendrayantoro (2014: 57) mengatakan kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, serta melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya menjadi indikator utama dalam menciptakan kemandirian.

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instansi”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto : 2007 )

1. Tahap Penyadaran

Dalam tahap ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, mereka juga didorong untuk memiliki motivasi agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dimulai dari diri

sendiri. Proses ini dapat dipercepat dan hasilnya dapat dirasionalkan melalui pendampingan atau fasilitator yang membantu mencapai kemandirian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pengembangan potensi yang dimiliki.

## 2. Tahap Pengkapasitasan

Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola peluang yang tersedia. Proses pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan serupa yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat secara optimal.

## 3. Tahap Pendayaan

Masyarakat diberikan kesempatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya melalui partisipasi yang aktif dan berkelanjutan. Mereka diberi peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka, serta aspirasi mereka diakomodasi. Masyarakat juga dibimbing untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan yang mereka buat dan hasil pelaksanaannya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia umumnya dan

masyarakat khususnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah mampu memandirikan dan memandirikan masyarakat ( Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007 ).

Dari beberapa pengertian para ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwa tahap pemberdayaan menurut Wrihatnolo : 2007 relevan dengan topik yang ingin peneliti teliti.

#### **1.5.2.5 Faktor – Faktor yang Terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam suatu pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang terkait pemberdayaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh (Sumaryadi 2005: 154-158) ) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

- a. Situasi dan kondisi yang mempengaruhi komunitas/ masyarakat menerima adanya pemberdayaan.
- b. Persepsi masyarakat tentang kekuasaan atas pelaksanaan pemberdayaan hanya ditujukan kepada orang tertentu.
- c. Budaya ketergantungan yang telah terpatritasi dalam masyarakat mengakibatkan mereka terpolat/ tertata dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- d. Adanya rasa egosentris dari para pemimpin yang belum memberikan kewenangan penuh terhadap masyarakat sendiri.

- e. Adanya batas pemberdayaan selama proses pemberdayaan dimana pada sisi lain kemampuan (*skill*) dan motivasi setiap individu berbeda.
- f. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
- g. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- h. Pentingnya dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Mardikanto (2013:188) menyatakan bahwa terdapat sejumlah factor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat yakni :

- a. Sumber daya alam

Sumber daya alam memainkan peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat, menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, pemanfaatan bijak sumber daya alam dapat menjadi landasan utama pembangunan, menciptakan peluang ekonomi, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terwujud melalui optimalisasi penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan energi. Pemberdayaan lokal tercapai dengan memberikan akses dan kontrol kepada

masyarakat atas sumber daya alam di wilayah mereka, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pendorong pemberdayaan karena peran sentralnya dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat. Kreativitas, kemampuan belajar, dan adaptasi membuat mereka mampu menghasilkan inovasi, mengatasi perubahan lingkungan, serta menjadi motor penggerak ekonomi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan peran sosial/kultural memperkuat keterlibatan individu dalam pembentukan nilai dan arah masyarakat. Pemberdayaan juga melibatkan aspek kesejahteraan dan kesehatan, memastikan akses pendidikan serta layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Sumber daya manusia dipandang sebagai subjek aktif, bukan hanya objek penerima manfaat, sehingga investasi dalam pengembangan potensi mereka dianggap strategis.

c. Keadaan Kelembagaan

Keadaan kelembagaan dianggap sebagai pendorong pemberdayaan karena lembaga-lembaga, termasuk pemerintahan dan badan nirlaba, merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memfasilitasi distribusi dana, pendidikan, serta infrastruktur. Lembaga pelatihan meningkatkan keterampilan, sementara lembaga demokratis memungkinkan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kelembagaan hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok, mendukung pemberdayaan. Institusi keuangan, seperti bank, memberikan akses ke modal dan layanan keuangan. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menciptakan sinergi untuk mendukung pemberdayaan melalui berbagai aspek.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting juga dalam pemberdayaan, memberikan dukungan melalui peningkatan aksesibilitas, mobilitas, dan fasilitas pelatihan, kesehatan, serta ekonomi. Infrastruktur teknologi dan informasi juga penting dalam era modern, sementara fasilitas keamanan dan olahraga menciptakan lingkungan yang stabil untuk fokus pada pengembangan diri. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber daya, memperkuat upaya pemberdayaan, dan menciptakan dasar kokoh untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

e. Kebijakan

Kebijakan merupakan faktor yang terkait dalam pemberdayaan karena menciptakan kerangka kerja, aturan, dan pedoman yang membentuk lingkungan pemberdayaan. Orientasi tujuan pemerintah, distribusi sumber daya yang adil, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, regulasi, dan mendorong

keterlibatan masyarakat menjadi alasan mengapa kebijakan menjadi faktor pendorong penting. Dengan kebijakan yang mendukung pemberdayaan, menciptakan kesempatan, dan membangun dasar pertumbuhan yang berkelanjutan.

f. Organisasi dan administrasi

Organisasi dan administrasi memegang peranan krusial dalam pemberdayaan karena keduanya membentuk kerangka kerja yang mendukung struktur, tujuan, dan distribusi sumber daya. Struktur dan keteraturan organisasi menyediakan landasan untuk mengelola sumber daya dengan efektif, sementara administrasi membantu dalam mengarahkan energi organisasi ke tujuan pemberdayaan. Distribusi sumber daya, komunikasi efektif, budaya yang mendukung, dan pengembangan sumber daya manusia juga diperankan oleh organisasi dan administrasi untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kesetaraan dan keadilan, memberikan peluang setara bagi pertumbuhan dan kontribusi individu atau kelompok.

Menurut Ibrahim (dalam Haqqie, 2016:27) terdapat faktor mendasar kendala pada pemberdayaan diantaranya:

1. Kurangnya perencanaan ataupun estimasi dalam proses difusi inovasi.
2. Adanya konflik yang muncul akibat permasalahan pribadi, berupa ketidaksepakatan antara anggota kelompok.

3. Kurangnya motivasi kerja serta perilaku pribadi yang berbeda mempengaruhi lancar tidaknya mekanisme inovasi
4. Inovasi tidak muncul
5. Permasalahan keuangan
6. Menolak suatu golongan serta kurangnya korelasi sosial

Menurut Handayani, A. V. (2023) terdapat 3 faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pemberdayaan Masyarakat di desa wisata, yaitu :

- a. Faktor penghambat yang pertama yaitu organisasi atau lembaga yang mengelola Desa Wisata dimana terdapat konflik internal antar anggota pengelola maupun antar pemangku kepentingan dan tumpang tindih jabatan.
- b. Faktor penghambat kedua dilihat dari aspek sumber daya manusia
- c. Faktor penghambat ketiga, modal usaha .

Berdasarkan pendapat Almasri dan Deswimar (dalam Haqqie, 2016:28) mengemukakan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Modal kecil
2. Penguasaan teknologi rendah
3. Peluang serta kesempatan kerja yang buruk
4. Keterbatasan pengembangan sumber daya manusia serta tidak dikuasainya akses pasar

Arsyiah (dalam Haqqie, 2016:27) memaparkan bahwasanya terdapat sejumlah faktor penghambat pada implementasi pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Sumber daya manusia yang terbatas
2. Kekurangan bahan baku
3. Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki
4. Akses pemerintah dengan swasta belum maksimal
5. Tidak ada sektor swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses, dan melalui indikator-indikator ini, kita dapat memahami perjalanan menuju keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Edi Suharto (2014; hlm 63-64) menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator keberdayaan masyarakat meliputi:

1. Kekuasaan Dalam (*power within*) Adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah, yaitu meliputi keinginan untuk berperan dalam mengembangkan kearifan lokal tikar mendong, keinginan untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi diri
2. Kekuasaan untuk (*power to*) Kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses meliputi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, kemudahan dalam memperoleh kredit dan kemudahan bekerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal dan perusahaan.

- 3 Kekuasaan Atas (*power over*) Kekampuan menghadapi hambata meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan asset, adanya perubahan peran di dalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat.
- 4 Kekuasaan Dengan (*power with*) Kemampuan kerja sama dan solidaritas meliputi adanya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) dan pada tahap selanjutnya yaitu muncul setelah istilah *driven development* yang artinya pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat atau *community directed development* atau pembangunan berbasis masyarakat

Dari beberapa faktor yang dikemukakan, faktor pemberdayaan menurut mardikanto : 2013 mencakup faktor faktor yang ingin penulis teliti, yaitu, sumber daya alam, sumber daya manusia, kebijakan, organisasi,keadaan kelembagaan, organisasi dan administrasi, serta sarana dan prasarana.

#### **1.5.2.6 Desa Wisata**

Desa Wisata merupakan sebuah wilayah perdesaan yang mempunyai beberapa karakteristik yang khusus demi menjadi desa tujuan wisata. Pada kawasan ini, masyarakatnya masih kental akan tradisi dan juga budaya yang masih relatif asli. Kemudian, ada

sejumlah faktor pendukung antara lain pola makan khas, selain itu juga ada sistem pertanian dan sistem sosial juga yang turut menghiasi terbentuknya sebuah desa wisata. Terlepas dari beberapa faktor di atas, lingkungan dan alam tetap menjadi salah satu faktor utama dari sebuah daerah tujuan wisata (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

Desa wisata ini pada dasarnya mengutamakan kearifan lokal dan budaya lokal. Masyarakat lokal juga mendorong pengelolaan dengan memanfaatkan potensi alam, sosial-ekonomi, budaya, sejarah, dan ruang yang ada. Akomodasi dan atraksi wisata adalah komponen utama kota wisata.

Salah satu bentuk kegiatan ekowisata di suatu kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat adalah desa wisata. Menurut Priasukmana, desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana holistik yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dalam sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat maupun kehidupan sehari-hari, memiliki keunikan arsitektur bangunan dan struktur tata ruang. desa atau unik dan menarik dan kegiatan ekonomi dengan karakteristik khas. Kemungkinan pengembangan berbagai elemen pariwisata seperti destinasi, akomodasi dan kebutuhan wisata lainnya. (Priasukmana & Mulyadin, 2013).

Desa wisata digambarkan sebagai struktur kehidupan masyarakat di mana atraksi wisata, fasilitas umum, akses, dan prosedur dan tradisi terintegrasi dengan baik. Desa wisata tidak hanya memiliki bangunan

dengan gaya arsitektur dan struktur tata ruang kota yang unik, tetapi juga memiliki aktivitas yang unik dan menarik yang dapat dikembangkan sebagai berbagai elemen wisata.

Menurut tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Desa Wisata Embrio, yaitu Desa yang memiliki potensi wisata yang luar biasa dapat berkembang menjadi desa wisata, dan akan ada gerakan masyarakat dan desa untuk mengelolanya di sana.
- b. Desa Wisata Berkembang, Embrio Desa Wisata Dikelola Masyarakat dan Pemerintah Desa: Ada swadaya masyarakat dan desa untuk mengembangkan dan mengelola desa wisata; promosi sedang dilakukan, dan wisatawan mulai tertarik. datang.
- c. Desa Wisata Maju, BUMDes, sebuah forum pengelola koperasi/BUMDes, telah berkembang menjadi kunjungan wisata yang berkelanjutan. BUMDes telah memiliki kemampuan untuk mempromosikan Desa wisata dan melakukan promosi dengan baik.. (Simanungkalit, Victoria, et al, 2017:20)

Ditekankan bahwa komponen terpenting dari sebuah desa wisata terdiri dari dua, yaitu:

- a. Akomodasi, yakni bagian dari populasi lokal atau unit pengembangan populasi.

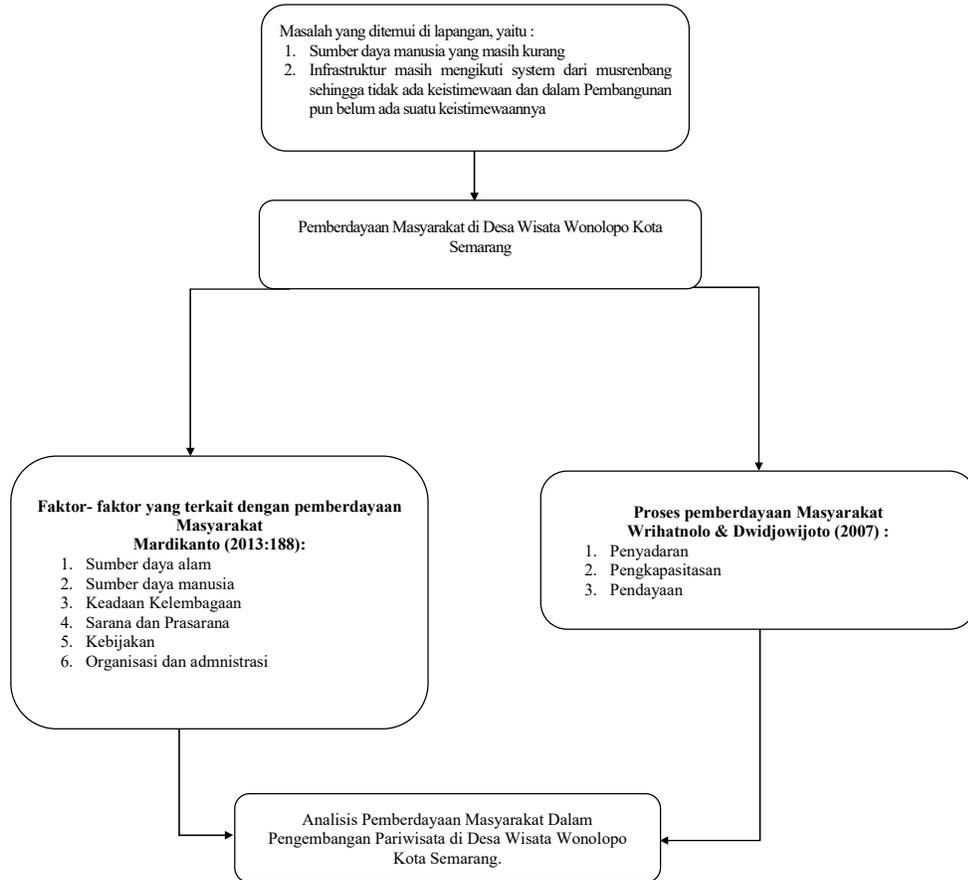
b. Atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa, dan hal-hal lain yang spesifik.( Nuryanti, W. ,1999)

Dari beberapa pendapat di atas menyimpulkan bahwa desa wisata adalah kawasan pedesaan dengan ciri khas dan keunikan tersendiri, baik daya tarik alam maupun budaya pedesaan, dan komunitas adalah tempat wisatawan berkunjung dan beristirahat, bisa dilampirkan. Semoga sukses di desa. Wisatawan, terutama mencerminkan cara konsumsi wisatawan asing, banyak wisatawan dengan minat khusus saat ini bertujuan untuk berinteraksi dengan keindahan alam, bukan lagi peningkatan keindahan alam. Dan cara hidup yang harmonis.

Secara keseluruhan Desa wisata ialah suatu bentuk atraksi antara integrasi, akomodasi serta fasilitas pendukung lainnya yang disajikan ke dalam sebuah struktur kehidupan warga yang menyatu melalui tata cara serta tradisi yang sedang berlaku.(Nuryanti, Wiendu 1993:1-2) Desa wisata dengan kata lain mengembangkan apa yang dimiliki potensi untuk menunjang perekonomian masyarakat local tanpa menghilangkan unsur budaya di dalamnya, karna budaya tersebut yang menjadi nilai jual.

### 1.5.3 Kerangka Berfikir

Tabel 1. 3 Kerangka Berfikir



### 1.6 Operasional Konsep

#### 1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Desa Wonolopo adalah sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Wonolopo melalui pemanfaatan potensi desa, yang akan dilihat dari:

1. Penyadaran adalah tahap sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat ini penting bagi kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri.
  - a. Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang desa wisata
  - b. Adanya pemahaman Masyarakat tentang tujuan desa wisata
2. Pengkapasitasan adalah tahap sebelum pendayaan, masyarakat perlu diberdayakan kecakapan dalam pengelolaannya tahap ini sering disebut *capacity building* yang terdiri dari pengkapasitasan manusia, organisasi dan system nilai.
  - a. Adanya pelatihan yang dilakukan untuk pemberian daya kepada masyarakat
  - b. Partisipasi masyarakat dalam pelatihan pemberdayaan yang dilakukan
3. Pendayaan adalah tahap dimana masyarakat diberi memberi daya dan peluang kepada masyarakat Desa Wisata Wonolopo sesuai dengan kualitas dan kecakapan yang dimiliki oleh masyarakat.  
Indikatornya yaitu:
  - a. Kecakapan masyarakat dalam Desa Wisata Wonolopo
  - b. Adanya evaluasi dari Masyarakat mengenai desa wisata wonolopo

### 1.6.2 Faktor – faktor yang terkait dengan Pemberdayaan

Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi prosesnya. Faktor pendorong adalah keadaan yang menunjang usaha, aktivitas ataupun produksi. Sedangkan, faktor penghambat ialah keadaan yang bisa melemahkan ataupun menghalangi usaha, aktivitas, ataupun produksi. Faktor - faktor penghambat pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Wonolopo yaitu :

1. Sumber daya alam adalah faktor yang ditentukan berdasarkan (dukungan dan ketersediaan)potensi yang dimiliki serta manajemen dalam pengembangan potensi sumber daya alam.
  - a. Adanya potensi sumber daya alam Desa Wisata Wonolopo
  - b. Adanya peran pemberdayaan lokal dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di wilayah Masyarakat
2. Sumber daya manusia adalah faktor yang ditentukan dari partisipasi sumber daya manusia dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat dan keaktifan sumber daya manusia dalam mengelola desa wisata.
  - a. Adanya dampak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
  - b. Adanya inovasi dan kreatifitas Masyarakat dalam mengembangkan desa wisata wonolopo
3. Keadaan Kelembagaan adalah faktor yang dilihat dari bagaimana kelembagaan dalam membri pemberdayaan kepada masyarakat

- a. Adanya struktur dan pembagian peran yang jelas dalam organisasi yang mengelola desa wisata
  - b. Adanya bantuan dari Lembaga pemerintah terkait dalam pemberdayaan Masyarakat di desa wisata wonolopo
4. Sarana dan Prasarana adalah faktor yang dapat dilihat dari aspek fasilitas yang ada di Desa Wisata Wonolopo yang dapat menunjang
- a. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pemberdayaan masyarakat di desa wisata
  - b. Adanya inovasi dalam meningkatkan sarana dan prasaranan yang ada di desa wisata
5. Kebijakan adalah faktor yang dilihat dari kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat maupun kebijakan pengelolaan desa wisata.
- a. Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat
  - b. Adanya dampak dari kebijakan yang di tetapkan

Tabel 1. 4 Operasional Konsep

<b>Indikator</b>	<b>Fenomena Penelitian</b>	<b>Sub Fenomena</b>
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang	Tahap Penyadaran	Adanya sosialisasi kepada Masyarakat tentang desa wisata
		Adanya pemahaman Masyarakat mengenai tujuan desa wisata
	Tahap Pengkapasitasan	Adanya pelatihan yang ditunjukan untuk pemberdayaan Masyarakat
		Partisipasi Masyarakat dalam

		pelatihan pemberdayaan yang dilakukan
	Tahap Pendayaan	Kecakapan masyarakat dalam Desa Wisata Wonolopo Adanya evaluasi dari Masyarakat mengenai desa wisata wonolopo
faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang	Sumber daya alam	Adanya potensi sumber daya alam Desa Wisata Wonolopo
		Adanya peran pemberdayaan lokal dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di wilayah Masyarakat
	Sumber daya manusia	Adanya dampak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
		Adanya inovasi dan kreatifitas Masyarakat dalam mengembangkan desa wisata wonolopo
	Keadaan kelembagaan	Adanya pemberitahuan dan terjalannya komunikasi antara Lembaga pemerintah dengan pihak pengelola desa wisata
		Adanya bantuan dari Lembaga pemerintah terkait dalam pemberdayaan Masyarakat di desa wisata wonolopo
	Sarana dan Prasarana	Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pemberdayaan masyarakat di desa wisata
		Adanya inovasi dalam meningkatkan sarana dan prasaranan yang ada di desa wisata
	Kebijakan	Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat
		Adanya dampak dari kebijakan yang di tetapkan

### 1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa yang dibahas yaitu tentang analisis pemberdayaan masyarakat dalam

pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Setiap peneliti memiliki fokus dan lokusnya masih-masing pada penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah ide atau gagasan yang akan membuat penelitian berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila dilihat dari segi manajemen publik belum ada penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Oleh karena itu peneliti sendiri akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan objek Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

### **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam mendapatkan hasil pemahaman berdasarkan penyelidikan dan pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang diamati. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek dan obyek secara alamiah tanpa dibuat buat dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna yang didapatkan. Pendekatan kualitatif ini dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini karena

metode ini dapat menemukan dan memahami makna atau hal hal yang tidak terlihat dalam suatu fenomena yang susah untuk ditafsirkan

### **1.8.1 Tipe penelitian**

Menurut Kerlinger dan Lee, penelitian dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan tujuannya: penelitian eksploratif (*exploratory research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan penelitian kausal (*explanatory research*). Tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menganalisis suatu proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, dan menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang model pemberdayaan masyarakat melalui bidang pariwisata. (Adi Kusumastuti et al., 2020)

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat penelitian itu dilakukan. Informasi informasi terkait untuk data yang diperlukan dapat ditemukan di situs penelitian (Wiratna Sujarwene 2014:73). Dalam langkah penetapan lokasi, sangat penting saat melangsungkan penelitian kualitatif, karena objek serta tujuan dapat ikut ditetapkan dan tentunya akan mempermudah peneliti dalam penelitian. Fokus penelitian berasal dari berbagai fenomena yang dirinci dan kemudian ditetapkan sebagai fokus dalam penelitian (Salladien, 2008) Sesuai dengan judul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang

“ maka penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Wonolopo yang terletak di Desa Wonolopo Kelurahan Wonolopo Kota Semarang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memegang peranan yang krusial karena dari merekalah data mengenai variabel yang diamati dalam penelitian diperoleh. Penentuan subjek penelitian ini didasarkan pada penggunaan teknik *Purposive Sampling*, di mana data dikumpulkan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data ini tidak dipilih secara acak, melainkan diperoleh dari subjek atau informan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.(ibid)

Dengan menerapkan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk selektif dalam menetapkan sampel yang memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dengan jelas. Prinsip ini menjadi penting karena keterwakilan sampel yang tepat akan memberikan gambaran yang akurat terhadap fenomena yang sedang diteliti, dan pada gilirannya, membantu dalam pencapaian tujuan inti dari penelitian tersebut.

Oleh karena itu, subyek penelitian dalam penelitian ini yakni:

- Dinas Pariwisata Kota Semarang
- Kelurahan Wonolopo

- Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Wisata Wonolopo
- Masyarakat Sekitar desa wisata Wonolopo

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data menurut Patton (Emzir, 2010) ada tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu: wawancara, pengamatan, dokumen. Pada penelitian ini jenis data yaitu data kualitatif yang berasal dari wawancara dengan informan yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Camat atau perangkat kelurahan wonolopo, Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Wisata Wonolopo, Masyarakat Sekitar desa wisata Wonolopo. Lalu pengamatan langsung berupa foto dari objek desa wisata Wonolopo dan dokumentasi berupa data dari dinas terkait serta literature jurnal terdahulu.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam Moloeng, 2013: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Selain itu Sumber data menurut Sugiyono (2009:137) ialah semua hal yang bernilai informatif bagi kelangsungan penelitian terkait data penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu berupa wawancara atau observasi terhadap objek penelitian dan data sekunder berupa jurnal, artikel, data dari Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan bahan bacaan di internet mengenai topik yang dibahas didalam penelitian.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur dalam mendapatkan informasi yang diharapkan dapat menjawab isu atau isu yang menjadi titik fokus eksplorasi. Ada tiga macam strategi pemilahan informasi, khususnya observasi/pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi Alasan observasi/pengamatan secara langsung adalah untuk menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung di lapangan dan persepsi langsung terhadap sumber-sumber data di daerah eksplorasi. Observasi yang dibuat dalam tinjauan ini adalah sebagai persepsi langsung terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Sedangkan wawancara dalam dan luar adalah prosedur yang digunakan sebagai diskusi atau tanya jawab dengan saksi untuk menyelidiki informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian. Pertemuan dalam penelitian kali ini adalah tentang analisis pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wonolopo Kota Semarang. Terakhir, ada teknik dokumentasi, khususnya peneliti akan mengumpulkan informasi yang diambil dari catatan, tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk situasi ini, informasi yang dicari adalah tentang

program pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten (Sugiyono, 2018W. Dalam hal mereduksi data yaitu mereduksi data mengenai program pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Sedangkan dalam hal penyajian data yaitu mendeskripsikan tentang evaluasi program pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Terakhir dalam hal penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

Menurut Hidayat (2002:89) kriteria penentuan kualitas data terdiri dari *objectivity, reliability and validity (internal dan external validity)*. Lalu kriteria selanjutnya adalah *historical situatedness* yaitu

sejauhmana penelitian melibatkan prinsip historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kemudian *enlightening,empowering, dan wholeness* artinya sejauhmana penelitian bersifat holistic,terhindar dari analisis partial. Kriteria terakhir yaitu *authenticity dan reflectivity* artinya refleksi dari kenyataan dan dipraktekan oleh manusia.

Pada penelitian ini penulis menyajikan data:

- Data informasi valid yang menunjukkan tingkat ketepatan antara informasi yang benar-benar terjadi pada item tersebut dengan informasi yang dikumpulkan oleh analis.
- Data informasi realible yang dapat dipercaya mengenai tingkat konsistensi/kemantapan informasi dalam rentang waktu tertentu.
- Data informasi obyektif sehubungan dengan pengaturan antara banyak individu. Artinya semakin banyak individu yang memberikan informasi serupa, maka pada saat itu informasi tersebut menjadi informasi yang obyektif.

Pada penelitian ini untuk mencapai data yang valid, realible dan obyektif yaitu dengan menggunakan triangulasi. Terdapat tiga pembagian triangulasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.